TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Fungsi yang diemban adalah :

1. Perumusan Kebijakan Teknis bidang sosial, seperti Perlindungan dan Jaminan sosial, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sementara Uraian tugas pokok dan fungsi pejabat struktural satu tingkat dibawah Kepala Dinas (Eselon III/a dan III/b) adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris:

- 1) Sekretaris Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas, memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Urusan Tata Usaha, Perlengkapan, Rumah Tangga, Evaluasi dan Pelaporan;
- 2) Sekretaris Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/urusan tata usaha;
 - b. Koordinasi penyusunan perencanaan;
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - f. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;

- g. Koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- i. Koordinasi penyusunan laporan kinerja dan tanggung jawab pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dibidang sosial; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

- 1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas, melaksanakan kebijakan teknis di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
 - d. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Bidang Rehabilitasi Sosial

- 1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas, melaksanakan kebijakan teknis di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
 - d. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pemberdayaan Sosial

- 1) Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas, melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial;
- 2) Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
 - e. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Penanganan Fakir Miskin

- 1) Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang penanganan fakir miskin;
- 2) Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara;
 - d. Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
 - e. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.